



**STRATEGI PENGAMANAN TAMU NEGARA PADA KEGIATAN
KENEGARAAN DI WILAYAH NKRI GUNA MENCIPTAKAN HUBUNGAN
INTERNASIONAL YANG HARMONIS DALAM RANGKA OMSP**

*(SECURITY STRATEGY FOR STATE GUESTS AT STATE ACTIVITIES IN THE TERRITORY
OF THE UNITED STATES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA TO CREATE
HARMONIOUS INTERNATIONAL RELATIONS IN THE FRAMEWORK OF MILITARY
OPERATIONS OTHER THAN WAR)*

Rudi Setiawan, Beni Rudiawan, Sungkunen Munthe
Prodi Strategi dan Kampanye Militer
Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
rudi.setiawan@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian adalah Paspampres saat ini menghadapi kondisi penugasan dan kegiatan pengamanan yang padat, tetapi terkendala dalam hal dukungan personel, alutsista dan lainnya. Padahal dalam pengamanan, Paspampres tidak boleh ada kegagalan atau kelemahan dalam sistem keamanan yang diterapkan. Sehingga, permasalahan penelitian adalah tanggung jawab yang besar ini belum sesuai ideal dihadapkan segala kemungkinan ancaman, gangguan, dan kesalahan yang mungkin terjadi di lapangan. Penelitian bertujuan membahas bagaimana pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI guna menciptakan hubungan internasional yang harmonis. Prosedur penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi. Teknik analisis menggunakan model interaktif yang akan mengolah data ampis titik jenuh. Hasil penelitian ditemukan Integrasi, sinkronisasi antara organisasi pengamanan VVIP sudah berjalan baik tetapi masih perlu koordinasi lebih detail terkait dengan aturan - aturan pengamanan VVIP. Kendala yang menghambat efektivitas koordinasi antara lain kompleksitas birokrasi struktur organisasi yang memperpanjang proses pengambilan keputusan, aliran informasi dan mengurangi efisiensi koordinasi. Serta komunikasi antara Paspampres dalam pengarahannya dan penempatan personel dengan keinginan dari Delegasi Tamu Negara. Kesimpulan penelitian adalah tugas pengamanan tamu negara telah dilaksanakan dengan baik oleh Paspampres. Pengamanan tamu negara dilaksanakan dengan mewujudkan peningkatan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan; sinkronisasi organisasi pengamanan VVIP; peningkatan pengamanan venue dan tempat menginap tamu negara; peningkatan pengamanan rangkaian kegiatan kenegaraan; peningkatan peliputan media internasional pada kegiatan kenegaraan di Indonesia. Saran penelitian adalah agar diwujudkan dukungan regulasi, anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia pengamanan VVIP serta mewujudkan kerjasama dan koordinasi antar unsur yang efektif dan efisien.



Kata Kunci: Pasukan Pengaman Presiden, Tamu Setingkat Kepala Negara/Pemerintahan, Acara Kenegaraan, Pengamanan Tamu Negara.

Abstract

The background to the research is that the Presidential Security Forces are currently facing busy conditions of security assignments and activities, but are constrained in terms of personnel support, defense equipment and others. In fact, in security, the Presidential Security Forces must not have any failures or weaknesses in the security system implemented. So, the problem with research is that this large responsibility is not ideal in the face of all possible threats, disturbances and errors that may occur in the field. The research aims to discuss how to safeguard state guests at state activities in the territory of the Republic of Indonesia in order to create harmonious international relations. The research procedure uses a qualitative research method with a phenomenological approach. The analysis technique uses an interactive model which will process the saturation point ampsi data. The research results found that integration and synchronization between VVIP security organizations had gone well but still needed more detailed coordination regarding VVIP security rules. Obstacles that hinder the effectiveness of coordination include the complexity of the bureaucratic organizational structure which lengthens the decision-making process, the flow of information and reduces coordination efficiency. As well as communication between the Presidential Security Forces in the direction and placement of personnel with the wishes of the Delegation of State Guests. The conclusion of the research is that the task of protecting state guests has been carried out well by the Presidential Security Force. Security of state guests is carried out by realizing increased coordination between relevant ministries and institutions in the implementation of state activities; synchronization of VVIP security organizations; increasing security of venues and places to stay for state guests; increasing security for a series of state activities; increasing international media coverage of state activities in Indonesia. The research suggestion is to realize support for regulations, budget, infrastructure and human resources for VVIP security as well as realizing effective and efficient cooperation and coordination between elements.

Keywords: Presidential Security Forces, Head of State/Government Level Guests, State Events, Security for State Guests.

Pendahuluan

Guna mewujudkan hubungan Internasional yang harmonis melalui kegiatan diplomatik antar negara secara berkesinambungan. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian secara maksimal terhadap Pengamanan Tamu Negara pada Kegiatan Kenegaraan di wilayah NKRI melibatkan kerja sama antara berbagai instansi terkait seperti TNI, Polri, Kementrian dan instansi keamanan lainnya.



Dalam mewujudkan tugas pokok tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, TNI menjalankan berbagai fungsi, yang keseluruhannya secara sinergis mendukung program pemerintah Republik Indonesia. Salah satu fungsi tersebut dijalankan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), sebagai bagian dari Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Markas Besar TNI.

Satuan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat dan dimanapun berada kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya serta tugas protokoler khusus pada upacara-upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar lingkungan Istana Kepresidenan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI, hal tersebut merupakan penjabaran dari Tugas pokok TNI sebagaimana tertuang dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai pasal 7 ayat 2 UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) merupakan satuan elit yang personelnya berasal dari tiga matra TNI (AD, AL, AU), salah satu tugas pokoknya adalah mengamankan presiden, wakil presiden beserta keluarganya. Dasar aturan Paspampres dalam melaksanakan tugas tersebut adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 mengenai operasi militer selain perang yang mengatur tentang kewajiban operasi keamanan terhadap VVIP.

Paspampres bertugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat dan dimanapun berada kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya, serta tugas protokoler khusus pada upacara-upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar lingkungan Istana Kepresidenan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.



Situasi dan kondisi ancaman yang dihadapi oleh Pengamanan VVIP sangat dinamis, selain bersumber dari jenis ancaman, dislokasi Pengamanan VVIP juga sangat menentukan pelaksanaan operasi. Keamanan tamu negara dianggap sebagai prioritas utama selama melaksanakan kunjungan di wilayah NKRI. Tamu negara yang hadir harus merasa aman dan terjamin keamanannya selama berada di wilayah NKRI. Oleh karena itu, kondisi pengamanan tamu negara menjadi hal yang sangat krusial.

Pengamanan yang baik tidak hanya menunjukkan profesionalisme negara dalam menyelenggarakan kegiatan kenegaraan, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap tamu negara dan negaranya. Keberhasilan dalam memberikan keamanan yang optimal akan mencerminkan profesionalisme, kemandirian dan kesungguhan negara dalam membangun hubungan diplomatik yang kokoh dan harmonis dengan negara-negara sahabat di seluruh dunia.

Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan merupakan representasi negara asing, yang harus mendapat perlakuan pengamanan secara khusus dari Pemerintah Republik Indonesia selama berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia. Pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah Indonesia dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan tamu negara selama berada di Indonesia. Kegiatan kunjungan tersebut dapat berupa Kunjungan Kenegaraan, Kunjungan Resmi, Kunjungan Kerja, Kunjungan Pribadi maupun Perjalanan Transit. *Treatment* terhadap berbagai kunjungan Tamu Negara tersebut berbeda - beda.

Mengingat tanggung jawab yang begitu besar, maka segala kemungkinan ancaman, gangguan, dan kesalahan harus diantisipasi semaksimal mungkin. Untuk itu, dalam melaksanakan operasi pengamanan, Tentara Nasional Indonesia berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Berbagai lembaga keamanan di Indonesia, termasuk Polri, TNI, dan lembaga keamanan terkait lainnya, bekerja sama secara erat untuk menjaga keamanan tamu negara. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini penting untuk menjamin keberhasilan pengamanan tamu negara. Indonesia telah memiliki pengalaman dalam mengamankan tamu negara



dalam berbagai kunjungan kenegaraan sebelumnya. Keahlian dan kompetensi lembaga keamanan dalam menghadapi tantangan keamanan diakui secara umum.

Indonesia juga menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal pengamanan tamu negara. Hal ini dapat mencakup pertukaran intelijen, pelatihan keamanan bersama dan koordinasi tindakan keamanan dalam menghadapi ancaman bersama. Pengamanan tamu negara di Indonesia juga mempertimbangkan faktor budaya dan etika. Selama kunjungan tamu negara, keamanan tetap menjadi prioritas, tetapi juga diusahakan agar tamu negara merasa disambut dengan hangat dan menjaga kesan positif tentang Indonesia.

Dalam pengamanan tamu negara, tidak boleh ada kegagalan atau kelemahan dalam sistem keamanan yang diterapkan. Menanggapi tugas tanggung jawab Paspampres, Panglima TNI sebagai eselon utama pimpinan TNI mengeluarkan petunjuk penyelenggaraan operasi keamanan terhadap personel VVIP yang salah satunya mengatur mengenai protap keamanan yang harus dilakukan oleh khususnya bagi personel Paspampres. Dalam pelaksanaan melakukan penjagaan selama 24 jam dan melakukan patroli dengan waktu tertentu di Istana negara, Istana Merdeka dan Istana Bogor.

Dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan yang mempengaruhi pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di Indonesia, antara lain:

- a. Pertama, masih kurangnya koordinasi antara Kementerian dan Lembaga terkait di dalam penyelenggaraan kegiatan Kenegaraan. Salah satu persoalan utama adalah koordinasi dalam hal kepemimpinan dan tata kelola. Pentingnya pertukaran informasi yang efektif antara Kementerian dan lembaga terkait tidak boleh diabaikan. Persoalan dapat timbul jika ada kekurangan dalam berbagi informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu antara pihak-pihak terkait. Ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman, koordinasi yang buruk, dan pengambilan keputusan yang tidak optimal. Koordinasi antara Kementerian dan lembaga terkait juga harus mencakup harmonisasi kebijakan. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing pihak tidak saling bertentangan atau menghambat pelaksanaan kegiatan kenegaraan.



- b. Kedua, belum sinkronnya organisasi pengamanan VVIP pada kegiatan Pengamanan Tamu Negara. Pelaksanaan pengamanan VVIP masih mengacu pada Jukgar Operasi Pengamanan VVIP Nomor Kep/1287/XII/2018 Tanggal 5 Desember 2018. Dimana telah cukup sinkron dalam pelaksanaan tugas dan dinamika yang terjadi dapat diatasi. Persoalan yang muncul adalah analisis risiko yang komprehensif untuk mengevaluasi ancaman potensial terhadap VVIP dan tamu negara. Hal ini meliputi identifikasi potensi ancaman seperti serangan teroris, kekerasan politik, gangguan sosial, atau ancaman individu tertentu. Analisis risiko yang mendalam diperlukan untuk menentukan langkah-langkah pengamanan yang tepat. Tanpa sinkronisasi yang baik, beberapa unit pengamanan mungkin melakukan tindakan yang tumpang tindih atau berlebihan. Ini bisa membingungkan tamu negara dan peserta acara serta membuang-buang sumber daya.
- c. Ketiga, pengamanan *Venue* dan tempat menginap Tamu Negara belum maksimal. Persoalan muncul dalam memperkuat pengamanan fisik di *venue* dan tempat menginap tamu negara. Hal ini melibatkan pemasangan sistem pengamanan seperti CCTV, pengaturan perimeter yang ketat, pengawalan keamanan, dan peningkatan keamanan bangunan atau fasilitas yang digunakan.
- d. Keempat, pengamanan rangkaian kegiatan kenegaraan belum maksimal. Persoalan muncul dalam pengawalan dan pengamanan transportasi yang digunakan dalam rangkaian kegiatan kenegaraan, pengawalan kendaraan, pengaturan rute, dan pengamanan jalur transportasi harus diperhatikan untuk melindungi tamu negara dan memastikan keamanan selama perjalanan.
- e. Kelima, masih Kurangnya peliputan Media Internasional pada kegiatan Kenegaraan di Indonesia. Peliputan media internasional adalah salah satu cara untuk melakukan diplomasi publik, yaitu memengaruhi opini publik di negara lain melalui media dan komunikasi. Persoalan muncul dalam memberikan akses yang memadai bagi media internasional untuk meliput kegiatan kenegaraan di Indonesia. Hal ini meliputi pemberian visa jurnalis, izin kerja, dan akses ke tempat-tempat acara. Kurangnya peliputan ini dapat



menghambat upaya untuk mempromosikan kebijakan, perkembangan, pesan tertentu dan kegiatan yang terjadi di Indonesia kepada masyarakat dunia.

Pengamanan tamu negara merupakan tanggung jawab penting yang diemban oleh TNI dan pihak keamanan lainnya. TNI diharapkan dapat mengidentifikasi dengan jelas tujuan utama dari pengamanan tamu negara, struktur organisasi pengamanan tamu negara yang efektif, memungkinkan koordinasi yang baik antarbagian, dan memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai optimalisasi pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI guna menciptakan hubungan internasional yang harmonis dalam rangka menegakan harkat dan martabat bangsa. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam pengamanan VVIP khususnya tamu negara yang dilaksanakan di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan metoda penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan uraian yang jelas, sistematis, faktual, akurat, dan valid mengenai optimalisasi pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI guna menciptakan hubungan internasional yang harmonis dalam rangka tugas OMSP.

Hasil dan Pembahasan

Pengamanan Tamu Negara pada Kegiatan Kenegaraan di Wilayah NKRI

Pengamanan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, diselenggarakan oleh Panglima TNI dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri, Duta



Besar dan/atau Kepala Perwakilan Negara yang bersangkutan, Kepala Badan Intelijen Negara, Kapolri, serta pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

VVIP (Very-very Important Person/Objek) merupakan kata ganti Presiden RI, Wakil Presiden RI beserta keluarganya dan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Tamu Negara adalah tamu Presiden RI atau Wakil Presiden RI setingkat Kepala Negara/Pemerintahan atau tamu yang diberi perlakuan setingkat Kepala Negara/Pemerintahan yang melakukan kunjungan ke Indonesia terdiri atas Presiden, Raja, Kaisar, Ratu, Sultan, Yang Dipertuan Agung, Paus, Gubernur Jenderal, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Kanselir dan Sekjen PBB (Sesko TNI, 2019).

Pengamanan *VVIP* adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan terus menerus untuk menjaga keselamatan jiwa *VVIP* dari segala situasi dan kondisi yang diciptakan lawan dan dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatan jiwa *VVIP*. Penyelamatan *VVIP* adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu perencanaan dan perintah atasan yang berwenang dalam rangka menyelamatkan jiwa *VVIP* dari ancaman faktual yang telah terjadi. Tamu Negara adalah Presiden atau Wakil Presiden atau pejabat yang setingkat negara lain yang datang berkunjung ke Indonesia atas undangan Pemerintah Indonesia. *VVIP (Very Very Important Person)* adalah Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarga, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan atau setingkat yang berkunjung ke Indonesia. Tugas pengamanan *VVIP* merupakan tanggung jawab penuh Pasukan Pengamanan Presiden yang memiliki *SOP* yang berlaku melekat kepada semua prajurit Paspampres dalam melaksanakan tugasnya.

Prosedur keamanan yang ketat diterapkan dalam pengamanan tamu negara di Indonesia. Ini mencakup pengawalan ketat, pemeriksaan keamanan yang ketat di tempat-tempat yang akan dikunjungi, penggunaan teknologi keamanan canggih, dan peningkatan kehadiran pasukan keamanan di area kunjungan.

Kondisi pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI saat ini dibahas menggunakan Teori Manajemen (George R. Terry).

a. Aspek Perencanaan. Perencanaan dalam pengamanan tamu negara adalah proses penentuan tujuan dan penentuan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.



George R Terry mengidentifikasi beberapa aspek penting dalam perencanaan, yang meliputi: Tujuan (*Objectives*), Fleksibilitas (*Flexibility*), Integrasi (*Integration*), Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*) (2019). Dalam teori manajemen George Terry, perencanaan dianggap sebagai langkah awal dalam fungsi manajemen dan merupakan pondasi bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

1) Tujuan Pengamanan. Perencanaan dimulai dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pengamanan tamu negara harus jelas, terukur, dan relevan dengan tugas yang diemban. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat keterangan bahwa TNI belum secara maksimal mengidentifikasi dengan jelas tujuan utama dari pengamanan tamu negara. Tujuan ini dapat meliputi perlindungan keselamatan tamu negara, menjaga keamanan wilayah yang dikunjungi, memastikan lancarnya agenda kunjungan, dan melindungi reputasi negara. Tujuan ini harus dapat memberikan rasa aman kepada Tamu Negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI.

2) Fleksibilitas. Perencanaan pengamanan tamu negara harus memperhitungkan tingkat ketidakpastian yang ada. Oleh karena itu, perencanaan harus cukup fleksibel untuk dapat menyesuaikan strategi dan taktik dengan perubahan yang terjadi. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat keterangan bahwa dalam setiap perencanaan Ops Pam VVIP dilaksanakan simulasi rangkaian kegiatan kenegaraan. Dari mulai kedatangan di bandara sampai dengan menuju hotel, kemudian dari hotel menuju tempat acara. Semuanya dilakukan simulasi baik rute utama atau rute cadangan. Selama pelaksanaan simulasi akan di hasilkan gambaran utuh, mulai lamanya waktu kegiatan dan hitungan waktu selama pergerakan. Seluruhnya dapat di evaluasi sesuai dengan arahan pimpinan.

3) Integrasi. Perencanaan harus melibatkan semua bagian atau satuan dalam organisasi. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan dan sinergi antara tujuan dan tindakan yang diambil oleh setiap bagian. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat keterangan bahwa sinkronisasi antara organisasi pengamanan VVIP sudah berjalan baik tetapi masih ada hal -



hal yang perlu dikoordinasikan lebih detail terkait dengan aturan - aturan pengamanan VVIP.

Saat ini organisasi dalam pelaksanaan pengamanan VVIP masih mengacu pada Jukgar Operasi Pengamanan VVIP Nomor Kep/1287/XII/2018 Tanggal 5 Desember 2018. Seharusnya Jukgar sudah direvisi paling lambat 2 tahun.

4) Efisiensi dan Efektivitas. Perencanaan pengamanan tamu negara harus mempertimbangkan aspek efisiensi, yaitu melakukan kegiatan operasi dengan biaya yang efisien, serta aspek efektivitas yaitu mencapai tujuan dengan hasil yang optimal. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat keterangan bahwa Sampai dengan saat ini belum ada yang menghambat secara signifikan dalam Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan pengamanan VVIP, baik itu secara administrasi maupun langsung di lapangan.

b. Aspek Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting. Pengorganisasian pengamanan tamu negara dalam setiap acara kenegaraan di wilayah NKRI melibatkan penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, dan pengelompokan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. George R Terry mengidentifikasi beberapa aspek penting dalam pengorganisasian, antara lain: Struktur Organisasi (*Organizational Structure*), Koordinasi (*Coordination*), Delegasi (*Delegation*), Penempatan Personel (*Staffing*). Aspek-aspek tersebut membantu menciptakan struktur organisasi pengamanan tamu negara yang efektif, memungkinkan koordinasi yang baik antarbagian, dan memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efisien.

1) Struktur Organisasi. Dalam operasi pengamanan tamu negara sangat penting memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Struktur organisasi ini mencakup pembagian otoritas, tanggung jawab, dan hubungan antarbagian dalam organisasi. Struktur yang baik membantu mengatur aliran informasi, komunikasi, dan koordinasi antarbagian. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat keterangan bahwa



koordinasi antara Satgas kadang masih kurang efektif dalam suatu pelaksanaan pengamanan VVIP terutama unsur organisasi di Ring 1 dengan unsur di Ring 2 dan 3.

2) Koordinasi. Dalam operasi pengamanan tamu negara sangat penting koordinasi antarbagian dalam organisasi. Koordinasi dan kerjasama dilakukan untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang berbeda dapat dilakukan secara sinergis dan saling mendukung. Hal ini mencakup koordinasi tugas, waktu, sumber daya, dan informasi antarbagian.

3) Delegasi. Pentingnya delegasi wewenang dan tanggung jawab kepada anggota organisasi yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Delegasi memungkinkan pemberian otoritas kepada individu atau kelompok untuk mengambil keputusan dan bertindak dalam lingkup tanggung jawab mereka sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat keterangan bahwa Personel pengamanan VVIP cenderung memiliki fokus utama pada aspek keamanan dan perlindungan terhadap VVIP. Mereka terlatih untuk mengidentifikasi ancaman dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi VVIP.

Di sisi lain, delegasi tamu negara mungkin lebih fokus pada tujuan diplomatik, politik, atau ekonomi kunjungan mereka. Perbedaan fokus ini telah menyebabkan perbedaan pandangan tentang prioritas dan langkah-langkah keamanan yang diambil. Selain itu, perbedaan budaya, protokol, dan pengalaman sebelumnya dapat mempengaruhi pandangan dan harapan yang berbeda antara personel pengamanan VVIP dan delegasi tamu negara. Personel pengamanan mungkin mengikuti prosedur keamanan yang ketat sesuai dengan standar internasional, sementara delegasi tamu negara mungkin mengharapkan kebebasan yang lebih besar dalam interaksi dengan delegasi lain atau dalam menjalankan jadwal kunjungan mereka.

4) Penempatan Personel. Pengorganisasian juga melibatkan penempatan personel yang tepat pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi mereka. Oleh karena itu penting

memilih, melatih, dan mengembangkan SDM yang tepat untuk mencapai tujuan pelaksanaan pengamanan tamu negara. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat keterangan bahwa penempatan personel pengamanan yang berlebihan dapat menciptakan kesan yang tidak diinginkan, seperti terlalu banyak pengawalan, kerumitan dalam mobilitas, atau gangguan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Faktor komunikasi yang kurang, mengakibatkan personel pengamanan mungkin tidak sepenuhnya memahami kebutuhan dan preferensi delegasi tamu negara, yang dapat mengarah pada penempatan yang berlebihan dan mengganggu kenyamanan mereka.

c. Aspek Pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan melibatkan transformasi rencana menjadi tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. George R Terry (2010) mengidentifikasi beberapa aspek penting dalam pelaksanaan, antara lain: Aksi (*Action*), Pengarahan (*Direction*), Koordinasi (*Coordination*), Monitoring dan Pengendalian (*Monitoring and Control*). Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pelaksanaan pengamanan tamu negara dalam setiap acara kenegaraan di wilayah NKRI dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1) Aksi. Pelaksanaan melibatkan pengambilan tindakan sesuai rencana yang telah ditentukan. Hal ini melibatkan melakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Aksi yang diambil harus tepat waktu, efektif, dan terkoordinasi terutama dalam hal Pengamanan Venue dan tempat menginap Tamu Negara maupun Pengamanan rangkaian kegiatan kenegaraan. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat keterangan bahwa Rencana pengamanan Venue dan tempat menginap disesuaikan dengan Jukgar Operasi Pam VVIP dimana Ring 1 menjadi tanggung jawab Paspampres dan Ring 2 & 3 menjadi tanggung jawab unsur kewilayahan. Pengamanan sudah terbagi menjadi Ring 1, 2 dan 3 dimana akan terjadi aksi hambat apabila ada ancaman dari luar. Kemudian tim sterilisasi dilaksanakan pada J-12, J-5 (oleh unsur kewilayahan) dan J-3 (Paspampres)



sebelum pelaksanaan dan pemetaan ancaman juga dilihat dari lingkungan sekitar tempat acara. Lingkungan berupa gedung-gedung tinggi atau perbukitan dll.

2) Pengarahan. Pelaksanaan pengamanan tamu negara dalam setiap acara kenegaraan di wilayah NKRI memerlukan pengarahan yang jelas kepada individu atau kelompok yang bertanggung jawab melaksanakan tugas. Pengarahan ini mencakup memberikan petunjuk, tujuan, dan harapan yang jelas agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat keterangan bahwa ketika tamu negara berkunjung ke Indonesia, pengamanan VIP menjadi prioritas utama pemerintah. Para tamu negara diberikan pengarahan yang ketat terkait langkah-langkah keamanan yang harus diikuti selama kunjungan mereka.

3) Koordinasi. Pelaksanaan pengamanan tamu negara membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai tindakan dan bagian organisasi yang terlibat. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua tindakan saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Hal ini mencakup sinkronisasi waktu, sumber daya, informasi, dan komunikasi antarbagian.

4) Monitoring dan Pengendalian. Pelaksanaan pengamanan tamu negara harus didukung oleh sistem pemantauan dan pengendalian yang efektif. George R Terry menekankan pentingnya memonitor kemajuan pelaksanaan rencana, membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Monitoring dan pengendalian membantu memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu monitoring yang ada ialah dengan adanya peliputan media baik nasional maupun media asing.

Dalam penelitian yang dilakukan, didapat keterangan bahwa Peliputan media asing terhadap operasi pengamanan tamu negara pada saat di Indonesia bervariasi tergantung pada kebijakan dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait di negara yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberikan izin khusus

kepada media asing untuk meliput acara-acara terkait tamu negara dengan persyaratan tertentu, seperti batasan akses ke area-area tertentu atau aturan tertentu yang harus diikuti oleh para jurnalis. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan privasi tamu negara serta untuk menjaga operasi pengamanan berjalan dengan lancar.

Pada saat yang sama, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan yang membatasi akses media asing untuk menjaga kerahasiaan operasi pengamanan dan mencegah informasi yang sensitif bocor ke publik. Keamanan tamu negara adalah prioritas utama dalam operasi semacam itu, dan pengendalian media asing dapat dilakukan untuk memastikan keberhasilan pengamanan acara. Media asing sering kali memiliki prioritas pemberitaan global yang melibatkan negara-negara besar atau isu-isu yang dianggap memiliki dampak global yang signifikan. Kegiatan VVIP di Indonesia mungkin tidak dianggap memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks pemberitaan global.

d. Aspek Pengendalian. Pengendalian (*control*) adalah salah satu fungsi manajemen yang penting. Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. George R Terry mengidentifikasi beberapa aspek penting dalam pengendalian, yaitu: Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement*), Standar Kinerja (*Performance Standards*), Perbandingan dan Analisis (*Comparison and Analysis*), Tindakan Korektif (*Corrective Action*). Melalui pengendalian yang baik, manajer dapat memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien, serta dapat mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

1) Pengukuran Kinerja. Pengendalian pengamanan tamu negara dalam setiap acara kenegaraan di wilayah NKRI melibatkan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi, tim, atau individu terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memantau pencapaian tujuan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengukur tingkat keberhasilan pengamanan tamu negara dalam setiap acara kenegaraan di wilayah NKRI. Dalam

penelitian yang dilakukan, didapat keterangan bahwa belum dilaksanakan penetapan indikator Kinerja yang jelas dan terukur untuk mengukur keberhasilan dalam pengamanan tamu negara. Indikator tersebut dapat meliputi efektivitas pengawalan, respon terhadap ancaman potensial, tingkat kepuasan tamu negara, dan keberhasilan dalam mencegah insiden keamanan. Pihak TNI juga belum memaksimalkan kerja sama dengan instansi keamanan terkait, seperti kepolisian dan intelijen, untuk meningkatkan pengukuran kinerja dan pertukaran informasi terkait pengamanan tamu negara.

2) Standar Kinerja. Pengendalian melibatkan penetapan standar kinerja yang jelas dan terukur. Standar kinerja ini harus spesifik, terukur, dan relevan dengan tujuan organisasi. Standar tersebut memberikan acuan untuk mengevaluasi pencapaian dan menyediakan dasar untuk perbaikan yang diperlukan dalam pengamanan tamu negara dalam setiap acara kenegaraan di wilayah NKRI.

Dalam penelitian yang dilakukan, didapat keterangan bahwa setiap kunjungan tamu negara dan kegiatan VVIP bisa memiliki kondisi yang sangat khusus dan unik, sehingga sulit untuk menciptakan standar kinerja yang dapat diterapkan secara umum. Setiap kunjungan bisa melibatkan faktor-faktor yang berbeda, seperti tingkat ancaman keamanan, tipe tamu negara, dan skala kunjungan, sehingga standar kinerja yang seragam mungkin sulit diimplementasikan.

Selain itu belum ada tim khusus yang terdiri dari ahli keamanan, perwakilan pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan standar kinerja pasukan pengamanan VVIP. Tim tersebut dapat melakukan riset, studi perbandingan, dan konsultasi dengan ahli keamanan internasional untuk merancang standar yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

3) Perbandingan dan Analisis. Pengendalian pengamanan tamu negara dalam setiap acara kenegaraan di wilayah NKRI melibatkan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Hasil dari perbandingan tersebut kemudian dianalisis

untuk mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian, serta mengidentifikasi penyebabnya. Analisis ini membantu dalam mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

Dalam penelitian yang dilakukan, didapat keterangan bahwa Pengamanan VVIP dan tamu negara sering kali melibatkan informasi rahasia dan sensitif, termasuk rincian keamanan, protokol, dan taktik yang digunakan. Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan, beberapa aspek pengamanan tidak dapat dibahas secara terbuka atau dibandingkan secara publik. Selain itu, beberapa delegasi tamu negara memiliki kebijakan privasi yang ketat terkait pengamanan mereka sendiri. Analisis dan perbandingan yang mendalam dapat melibatkan pengungkapan informasi sensitif tentang keamanan delegasi tamu negara, yang dapat bertentangan dengan kebijakan privasi yang diterapkan.

Strategi pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI guna menciptakan hubungan internasional yang harmonis dalam rangka tugas OMSP.

Berdasarkan pembahasan penyelenggaraan pengamanan tamu negara yang ada saat ini serta interpretasi kondisi yang diharapkan, maka rumusan strategi diharapkan dapat memenuhi tujuan (*ends*) yang diterjemahkan dalam indikator keberhasilan pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI yang diharapkan meliputi:

a. Terselenggaranya komunikasi yang efektif antara Kementerian dan Lembaga terkait di dalam penyelenggaraan kegiatan Kenegaraan. Terselenggaranya komunikasi yang efektif antara Kementerian dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dapat diukur dari kelancaran pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi informasi, minimnya tumpang tindih tugas, keberhasilan mengatasi tantangan, tingkat kepuasan pihak terkait, serta efisiensi dan penggunaan sumber daya yang optimal. Koordinasi yang efektif akan berdampak positif pada kesuksesan dan profesionalitas dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraan, serta memperkuat citra NKRI sebagai negara yang dapat bekerja bersama dalam menyelenggarakan acara kenegaraan dengan baik.

b. Terwujudnya organisasi pengamanan VVIP pada kegiatan Pengamanan Tamu Negara yang efektif dan efisien. Terwujudnya organisasi pengamanan VVIP yang efektif pada



kegiatan pengamanan tamu negara dapat diukur dari tingkat keamanan yang tinggi, efektivitas pengawalan dan perlindungan, respons cepat terhadap ancaman potensial, ketertiban dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas, kesesuaian dengan standar kinerja, serta adanya evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Keberhasilan dalam mencapai indikasi-indikasi ini akan mencerminkan profesionalisme dan kualitas kerja tim pengamanan VVIP dalam menjaga keamanan tamu negara dan memperkuat citra NKRI sebagai negara yang mampu memberikan pengamanan yang baik dan efektif bagi tamu negara.

c. Terselenggaranya keamanan dan kenyamanan Tamu Negara pada *Venue* dan tempat menginap Tamu Negara. Terselenggaranya keamanan dan kenyamanan Tamu Negara pada *venue* dan tempat menginap tamu negara dapat diukur dari tidak adanya insiden keamanan, pengawalan dan pengendalian akses yang efektif, penerapan teknologi keamanan yang tepat, kelancaran logistik dan penyelenggaraan, kepuasan dan rasa aman tamu negara, serta evaluasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Keberhasilan dalam mencapai indikasi-indikasi ini menunjukkan bahwa pengamanan telah dilaksanakan dengan baik, dan tamu negara dapat merasa aman dan dihormati selama kunjungannya di NKRI.

d. Terselenggaranya keamanan dan kelancaran rangkaian kegiatan kenegaraan. Keberhasilan dalam terselenggaranya keamanan dan kelancara rangkaian kegiatan kenegaraan dapat diukur dari tidak adanya insiden keamanan, efektivitas pengawalan dan perlindungan, penerapan teknologi dan sistem keamanan yang canggih, pengendalian akses yang ketat, kelancaran logistik dan koordinasi antarlembaga, rasa aman masyarakat umum, serta evaluasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Indikasi-indikasi keberhasilan ini mencerminkan profesionalisme dan kualitas kerja dari tim pengamanan VVIP dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan kenegaraan.

e. Meningkatnya berita yang positif pada Media Internasional pada kegiatan Kenegaraan di Indonesia. Meningkatnya berita yang positif di media internasional pada kegiatan kenegaraan di Indonesia dapat diukur dari cakupan berita yang luas, sorotan yang maksimal dari media internasional, masuknya topik berita ke pemberitaan utama, cakupan berita dari berbagai negara, peningkatan jumlah penonton atau pembaca, dan pemberitaan berlanjut dan mendalam. Keberhasilan dalam mencapai indikasi-indikasi ini akan membantu memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia.

Berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditentukan di atas, maka disusun beberapa strategi serta upaya (*ways*) untuk mencapai setiap sasaran yang diinginkan berdasarkan skala prioritas.

Adapun strategi-strategi yang dimaksud disusun berdasarkan teori Teori Manajemen (George R. Terry) sebagai berikut.

a. Aspek Perencanaan. Dalam teori manajemen George Terry (2019), perencanaan dianggap sebagai langkah awal dalam fungsi manajemen dan merupakan pondasi bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Sebagai salah satu Balakpus TNI, Paspampres merupakan satuan yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengamanan VVIP mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut satuan Paspampres terbagi atas 4 Grup operasional dan beberapa Detasemen pendukung. Grup operasional terdiri atas 4 Grup yang dibedakan berdasarkan tugas pokok masing-masing yaitu Grup A melaksanakan pengamanan terhadap Presiden RI, Grup B melaksanakan pengamanan terhadap Wakil Presiden RI, Grup C melaksanakan pengamanan terhadap Tamu Negara dan Grup D melaksanakan pengamanan terhadap Mantan Presiden dan Wakil Presiden RI. Personel satuan Paspampres merupakan personel hasil rekrutmen melalui proses seleksi dari satuan-satuan elite tiap matra seperti satuan Marinir (TNI AL), Kopassus (TNI AD) dan Korps Paskhas (TNI AU) dan satuan-satuan lainnya (Mabes TNI, 2022).



Berdasarkan pada definisi tersebut, maka sudah sejatinya tugas pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI perlu dioptimalkan dan dilengkapi oleh *standard operational procedure* (SOP). Namun didalam pelaksanaannya, SOP ini dirasakan kurang berjalan dengan semestinya. Hal ini mengakibatkan personel yang bertugas di lapangan kurang dapat menyikapi perubahan situasi dengan cepat.

Sehingga, pada aspek perencanaan, dapat dilaksanakan strategi berikut ini:

- 1) Menyusun mekanisme koordinasi pengamanan antara Kementerian dan Lembaga terkait di dalam penyelenggaraan kegiatan Kenegaraan. Upaya ini didasarkan pada koordinasi antara Kementerian dan Lembaga terkait di dalam penyelenggaraan kegiatan Kenegaraan, yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan TNI AD, AL dan AU, serta Komandan Paspampres.
- 2) Membuat regulasi yang memayungi hubungan Paspampres dengan instansi terkait di luar Mabes TNI. Tugas-tugas satuan Paspampres dalam pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI didukung oleh Polri. Sehingga penyusunan *Standard Operational Prosedure* (SOP) harus dapat dijalankan ketentuan yang berlaku. Khususnya instansi lain seperti Kepolisian diharapkan adanya penyempurnaan terhadap SOP, sehingga personel bertugas dilapangan dapat menyikapi perubahan situasi dengan cepat sesuai dengan SOP yang adaptif. Pihak-pihak terkait didalam pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI diharapkan dapat memiliki Buku Petunjuk Teknis dan Taktis dalam rangka pelaksanaan operasi pengamanan sesuai dengan fungsi masing-masing di tiap bagian dan ditambahkan dalam Bujuknis yang secara detail mengatur kegiatan operasi pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI dihadapkan kegiatan yang dinamis, baik pada saat pengamanan Presiden/Wakil Presiden serta pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI.
- 3) Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pengamanan secara terpadu. Diharapkan dapat tersedianya program-program kegiatan dari Paspampres yang terstruktur dan sistematis, jelas serta terperinci sehingga dapat dipedomani oleh satuan-satuan BKO dalam pelaksanaan tugas pengamanan tamu negara.

- 4) Menyiapkan protocol darurat dan evakuasi dari Venue dan tempat menginap Tamu Negara guna meningkatkan pengamanan Venue dan tempat menginap Tamu Negara. Dalam tahap persiapan, diperlukan upaya untuk manajemen krisis, mengingat tidak ada cara untuk mengetahui jenis krisis yang mungkin terjadi dan kapan. Sehingga protocol darurat dan evakuasi harus disiapkan sebelum terjadi krisis dengan memberikan gambaran umum tentang potensi ancaman yang mungkin dihadapi.
- 5) Menyiapkan protokol darurat dan evakuasi pada rangkaian kegiatan kenegaraan guna meningkatkan pengamanan rangkaian kegiatan kenegaraan.

b. Aspek Pengorganisasian. George R Terry mengidentifikasi beberapa aspek penting dalam pengorganisasian, antara lain: Struktur Organisasi (*Organizational Structure*), Koordinasi (*Coordination*), Delegasi (*Delegation*), Penempatan Personel (*Staffing*). Aspek-aspek tersebut membantu menciptakan struktur organisasi pengamanan tamu negara yang efektif, memungkinkan koordinasi yang baik antarbagian, dan memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efisien.

Dengan demikian terdapat beberapa upaya yang dapat dicapai, yaitu antara lain:

- 1) Pembangunan pengetahuan dan kemampuan personil Paspampres pada penyelenggaraan Pengamanan Tamu Negara. Bukan suatu hal yang mudah untuk menyiapkan kemampuan satuan Paspampres dalam rangka melaksanakan operasi pengamanan VVIP termasuk Pengamanan Tamu Negara, dibutuhkan suatu persiapan yang matang, terencana dan ditangani secara sungguh-sungguh. Keterampilan atau profesionalisme prajurit tentunya akan sangat bermanfaat bagi satuan Paspampres maupun untuk prajurit/personel itu sendiri dalam melaksanakan tugas. Namun apabila personel yang dipersiapkan tersebut hanya memiliki kemampuan yang standar saja tentunya saat *di mission area* (daerah penugasan) akan menghadapi berbagai kendala dan akan merasa kurang percaya diri atau "*Unconfident*".

Hal ini perlu didukung oleh penerapan SOP pengamanan VVIP yang harus berjalan dengan baik, sehingga personel yang bertugas dilapangan dapat menyikapi perubahan



situasi dengan cepat. Begitupun dengan dengan jumlah personel harus dapat mencukupi dalam menggelar pengamanan di Ring 1 secara ideal. Kondisi ini dapat optimal apabila didukung oleh pelaksanaan pembinaan latihan di tengah intensitas operasional yang cukup tinggi.

Memenuhi jumlah dan kemampuan personel Paspampres sesuai dengan hasil evaluasi kinerja mereka saat ini serta analisis kebutuhan pengembangan personel Paspampres.

Pemenuhan terhadap program pendidikan dan pelatihan organisasi Paspampres menjadi keharusan yang harus dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan tugas operasional yang berlangsung sepanjang tahun. Efektivitas operasi keamanan untuk tamu sangat penting dan dapat dicapai apabila struktur organisasi Paspampres terbentuk secara komprehensif, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, Paspampres bekerja sama dengan Staf Umum Markas Besar TNI dalam mengorganisasikan rekrutmen yang terstruktur guna memilih calon anggota Paspampres.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka diharapkan pada proses rekrutmen Paspampres dapat meminta alokasi khusus pada lulusan pendidikan pembentukan prajurit TNI dari level Tamtama sampai dengan Perwira Pertama untuk dapat ditempatkan secara langsung di Paspampres, setelah mereka menyelesaikan sekolah kejuruan atau kecabangannya. Sehingga Paspampres akan memiliki personel TNI yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dibina serta dilatih sejak awal sebagai personel Paspampres dengan segala bentuk keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan satuan Paspampres. Diharapkan perekrutan prajurit tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin, ditinjau dari berbagai aspek sebagai skala prioritas, yaitu: mental, fisik, akademis, kemampuan berbahasa asing.

Proses seleksi ini akan berlangsung di berbagai unit TNI yang telah memenuhi standar kualifikasi yang diharapkan oleh Paspampres, baik itu dalam lingkungan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, maupun TNI Angkatan Udara. Proses seleksi ini melibatkan berbagai unsur terkait seperti Pusat Kesehatan TNI, Dinas Jasmani, Dinas Psikologi, Staf



Intelijen, dan elemen lainnya. Pendekatan rekrutmen ini diharapkan mampu menghasilkan generasi penerus anggota Paspampres yang memiliki kualitas yang unggul.

Meningkatkan frekuensi dan mutu latihan anggota Paspampres sesuai dengan penilaian terhadap kemampuan mereka. Hal ini bertujuan agar personel Paspampres memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang optimal.

Dalam upaya ini, Paspampres diharuskan merancang pendekatan baru dalam Program Latihan Terstandarisasi dan juga pelatihan yang lebih spesifik sesuai dengan proyeksi perubahan ancaman di masa depan. Metode pelatihan yang ada harus diperbarui agar setiap anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terus berkembang sesuai dengan perubahan dalam situasi operasional dan tantangan di lapangan. Contohnya, potensi ancaman siber atau penggunaan drone perlu diakomodasi dalam latihan.

Kemampuan untuk menghadapi serangan dengan teknologi harus terus diasah untuk semua anggota Paspampres. Pola pelatihan juga harus diselenggarakan secara bertahap, dari tingkat tim, detasemen, hingga grup. Ini memastikan bahwa pelatihan mencakup semua aspek yang relevan dengan tanggung jawab mereka, serta mempersiapkan mereka untuk tugas-tugas yang semakin kompleks dan beragam di masa depan.

Langkah selanjutnya adalah mengadakan latihan bersama dan pelatihan yang dipimpin oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Latihan bersama ini dapat dilakukan antara Paspampres dan unit-unit elit anti-teror dalam TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Tujuan dari latihan bersama ini adalah untuk mencapai kesamaan persepsi dan pola operasi di masa yang akan datang. Dengan demikian, kolaborasi antara Paspampres dan unit lain dalam pelaksanaan operasi pengamanan VVIP dapat lebih baik. Ini tentu akan memudahkan komunikasi dan koordinasi di semua tingkatan, yakni Ring I, Ring II, dan Ring III.

2) Pembangunan sistem teknis Paspamres. Melakukan evaluasi terhadap sistem teknis yang diterapkan oleh Paspampres. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk memanfaatkan kerjasama dalam bidang pertahanan, khususnya dalam bentuk peningkatan

kapabilitas (*capacity building*), sehingga sistem teknis Paspampres dapat ditingkatkan dengan menerapkan praktik terbaik dari unit serupa di negara lain.

3) Pembangunan sistem manajerial Paspampres. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Paspampres. Evaluasi ini mempertimbangkan kebutuhan manajerial yang mencakup aspek anggaran, personel, materiil, dan metode operasional, sesuai dengan dimensi interoperabilitas baik di dalam TNI maupun dengan instansi terkait

4) Pembangunan nilai-nilai dan norma-norma Paspampres. Menyusun rencana kontijensi untuk kebutuhan pengamanan VVIP, baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa rencana pengamanan VVIP, termasuk tamu negara, dapat berjalan sesuai dengan sistem teknis dan manajerial Paspampres

c. Aspek Pelaksanaan. George R Terry (2010) mengidentifikasi beberapa aspek penting dalam pelaksanaan, antara lain: Aksi (*Action*), Pengarahan (*Direction*), Koordinasi (*Coordination*), Monitoring dan Pengendalian (*Monitoring and Control*). Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pelaksanaan pengamanan tamu negara dalam setiap acara kenegaraan di wilayah NKRI dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian terdapat beberapa upaya yang dapat dicapai, yaitu antara lain:

- 1) Penyediaan Informasi terkait kegiatan kenegaraan disajikan dengan jelas dan akurat pada peliputan Media Internasional terhadap kegiatan Kenegaraan di Indonesia.
- 2) Mengundang jurnalis asing untuk menghadiri dan meliput langsung kegiatan kenegaraan yang penting.

d. Aspek Pengendalian. Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. George R Terry mengidentifikasi beberapa aspek penting dalam pengendalian, yaitu: Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement*), Standar Kinerja (*Performance Standards*), Perbandingan dan

Analisis (*Comparison and Analysis*), Tindakan Korektif (*Corrective Action*). Melalui pengendalian yang baik, manajer dapat memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien, serta dapat mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan demikian terdapat beberapa upaya yang dapat dicapai, yaitu antara lain:

- 1) Melaksanakan evaluasi resiko dan ancaman Venue dan tempat menginap Tamu Negara guna meningkatkan pengamanan Venue dan tempat menginap Tamu Negara
- 2) Melaksanakan pengamanan fisik dan non fisik Venue dan tempat menginap Tamu Negara guna meningkatkan pengamanan Venue dan tempat menginap Tamu Negara.
- 3) Melaksanakan evaluasi resiko dan ancaman rangkaian kegiatan kenegaraan guna meningkatkan pengamanan rangkaian kegiatan kenegaraan.

Pengamanan pada saat Tamu Negara melakukan perjalanan digelar dengan mengerahkan unsur Walpri, Matan dan unsur pengawalan bermotor (Walmor). Secara umum pengamanan perjalanan darat sudah berjalan sesuai dengan standar pengamanan untuk Tamu Negara. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, personel Pamri dapat membaca situasi jalur-jalur yang akan dilalui oleh Tamu Negara. Sehingga permasalahan seperti kemacetan atau kendaraan kepresidenan yang mengalami mogok di tengah jalan dapat dieliminir dalam rangka menjaga keselamatan jiwa Tamu Negara.

- 4) Melaksanakan pengamanan fisik dan non fisik pada rangkaian kegiatan kenegaraan guna meningkatkan pengamanan rangkaian kegiatan kenegaraan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Dalam pengamanan tamu negara adalah langkah penting untuk menunjukkan sikap penghormatan dan keramahan terhadap para tamu. Pengamanan yang baik tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga aspek diplomasi dan protokol, sehingga tamu negara merasa dihormati dan dilindungi selama kunjungan mereka.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terkait pengamanan tamu negara sebagai pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Aspek Perencanaan terdiri dari* 1) Tujuan yaitu perlindungan keselamatan tamu negara, menjaga keamanan wilayah yang dikunjungi, memastikan lancarnya agenda kunjungan, dan melindungi reputasi negara. 2) Fleksibilitas untuk dapat menyesuaikan strategi dan taktik dengan perubahan yang terjadi. 3) Integrasi, sinkronisasi antara organisasi pengamanan VVIP sudah berjalan baik tetapi masih ada hal - hal yang perlu dikoordinasikan lebih detail terkait dengan aturan - aturan pengamanan VVIP. 4) Efisiensi dan Efektivitas, belum ada yang menghambat secara signifikan dalam Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan pengamanan VVIP.
- b. Aspek Pengorganisasian terdiri dari: 1) Struktur Organisasi, koordinasi antara Satgas kadang masih kurang efektif dalam suatu pelaksanaan pengamanan VVIP terutama unsur organisasi di Ring 1 dengan unsur di Ring 2 dan 3. 2) Koordinasi antara Kementrian dan Lembaga dapat berjalan baik. Hanya penjadwalan beberapa kegiatan terlalu mendadak sehingga berpengaruh terhadap penyiapan dalam kegiatan Tamu Negara. Kendala yang ditemui adalah Hal yang masih sering menghambat dalam koordinasi yang efektif adalah Struktur organisasi yang kompleks, dengan banyak tingkatan birokrasi dan proses pengambilan keputusan yang panjang, dapat menghambat aliran informasi dan mengurangi efisiensi koordinasi. 3) Delegasi, terdapat perbedaan fokus dan persepsi antara Paspampres dan Delegasi tamu negara, sehingga cenderung berbeda terhadap prioritas dan langkah-langkah keamanan yang diambil. 4) Penempatan Personel, ditemukan kendala komunikasi antara Paspampres dalam pengarahan dan penempatan personel dengan keinginan dari Delegasi Tamu Negara.
- c. Aspek Pelaksanaan terdiri dari 1) Aksi, Rencana pengamanan Venue dan tempat menginap sudah sesuai dengan Jukgar Operasi Pam VVIP. 2) Pengarahan berupa protocol keamanan, pengamanan pribadi, dan kerahasiaan operasi. 3) Koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. 4) Monitoring dan Pengendalian dilakukan terutama pada upaya pemberitaan yang ingin dipublikasikan dalam pemberitaan global.



d. Aspek Pengendalian, terdiri dari 1) Pengukuran Kinerja dilakukan dengan indikator efektivitas pengawalan, respon terhadap ancaman potensial, tingkat kepuasan tamu negara, dan keberhasilan dalam mencegah insiden keamanan. 2) Standar Kinerja berbeda-beda pada setiap kunjungan dari tamu negara. 3) Perbandingan dan Analisis dilakukan terkait pengungkapan informasi sensitif tentang keamanan delegasi tamu negara, yang dapat bertentangan dengan kebijakan privasi yang diterapkan.

Strategi pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI guna menciptakan hubungan internasional yang harmonis dalam rangka tugas OMSP.

Upaya pengamanan tamu negara perlu melibatkan kerjasama antara berbagai instansi terkait di dalam negeri, termasuk aparat keamanan, pihak diplomatik, dan berbagai lembaga terkait lainnya. Selain itu, kerjasama internasional juga penting untuk pertukaran informasi dan pelatihan keamanan antar negara dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua pihak. Dalam mewujudkan keberhasilan di dalam pelaksanaan kegiatan maka strategi pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI dilaksanakan sebagai berikut:

a. Aspek perencanaan, dapat dilaksanakan strategi berikut ini: 1) Menyusun mekanisme koordinasi pengamanan antara Kementrian dan Lembaga terkait di dalam penyelenggaraan kegiatan Kenegaraan; 2) Membuat regulasi yang memayungi hubungan Paspampres dengan instansi terkait di luar Mabes TNI; 3) Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pengamanan secara terpadu; 4) Menyiapkan protocol darurat dan evakuasi dari Venue dan tempat menginap Tamu Negara guna meningkatkan Menyiapkan protokol darurat dan evakuasi pada rangkaian kegiatan kenegaraan guna meningkatkan pengamanan rangkaian kegiatan kenegaraan; 5) pengamanan Venue dan tempat menginap Tamu Negara.

b. Aspek pengorganisasian, dapat dilaksanakan strategi berikut ini: 1) Pembangunan pengetahuan dan kemampuan personil Paspampres pada penyelenggaraan Pengamanan Tamu Negara; 2) Pembangunan sistem teknis Paspamres; 3) Pembangunan sistem manajerial Paspampres; 4) Pembangunan nilai-nilai dan norma-norma Paspampres.



- c. Aspek pelaksanaan, dapat dilaksanakan strategi berikut ini: 1) Penyediaan Informasi terkait kegiatan kenegaraan disajikan dengan jelas dan akurat pada peliputan Media Internasional terhadap kegiatan Kenegaraan di Indonesia; 2) Mengundang jurnalis asing untuk menghadiri dan meliput langsung kegiatan kenegaraan yang penting.
- d. Aspek pengendalian, dapat dilaksanakan strategi berikut ini: 1) Melaksanakan evaluasi resiko dan ancaman Venue dan tempat menginap Tamu Negara guna meningkatkan pengamanan Venue dan tempat menginap Tamu Negara; 2) Melaksanakan pengamanan fisik dan non fisik Venue dan tempat menginap Tamu Negara guna meningkatkan pengamanan Venue dan tempat menginap Tamu Negara; 3) Melaksanakan evaluasi resiko dan ancaman rangkaian kegiatan kenegaraan guna meningkatkan pengamanan rangkaian kegiatan kenegaraan; 4) Melaksanakan pengamanan fisik dan non fisik pada rangkaian kegiatan kenegaraan guna meningkatkan pengamanan rangkaian kegiatan kenegaraan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat diajukan beberapa saran kepada pimpinan untuk dapat mengoptimalkan pengamanan Tamu Negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI guna menciptakan hubungan internasional yang harmonis dalam rangka menegakan harkat dan martabat bangsa melalui beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Kementerian Pertahanan, mohon agar dapat dilakukan evaluasi dan implementasi sepenuhnya terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 agar sehingga dapat menjadi dasar perubahan kebijakan negara terhadap pelaksanaan fungsi pengamanan VVIP dan mendorong optimalisasi dukungan anggaran, sarana prasarana, dan personil bagi TNI dalam menjalankan fungsi tersebut.
- b. Bagi Kementerian Sekretariat Negara, mohon agar dapat diberikan sosialisasi ulang terkait protokol diplomatik dan tata cara penyambutan tamu negara. Sehingga, dapat dipastikan bahwa upaya pengamanan tidak bertentangan dengan protokol yang telah ditetapkan.



Koordinasi yang baik antara instansi yang bertanggung jawab dalam pengamanan tamu negara meliputi militer, kepolisian, dan badan intelijen. Kepala Staf Angkatan dan Panglima Kotama perlu memastikan bahwa semua pihak bekerja bersama-sama dengan efisien dan terkoordinasi untuk menghindari kekacauan atau celah dalam pengamanan.

a. Bagi Panglima TNI, mohon agar dapat dilakukan evaluasi pada Jukgar Operasi Pengamanan VVIP Nomor Kep/1287/XII/2018 Tanggal 5 Desember 2018 yang digunakan sebagai pedoman dalam pengamanan VVIP. Saat ini Jukgar tersebut sudah 5 tahun dan perlu penyesuaian dengan situasi dan kondisi terkini.

b. Bagi Danpaspampres, mohon agar dapat meningkatkan *core capabilities* Paspampres untuk dijadikan acuan pengendalian dan evaluasi baik bagi Kogabwilhan sebagai Kotamaops Pam VVIP TNI, Mensesneg (Setpres dan Setmilpres), maupun Polri dan pemerintah daerah. Hal ini mengingat pengamanan tamu negara memerlukan pendekatan holistik dan terkoordinasi yang melibatkan banyak elemen dan keseluruhan strategi harus disesuaikan dengan situasi unik dari setiap kunjungan tamu negara.

Daftar Pustaka

Liddell Hart, B. H. (1967). *Strategy* (2nd rev ed.). London: Faber

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2011. *A Guidebook for Successful Communication, Cooperation, and Coordination Strategies Between Transportation Agencies and Tribal Communities*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/14528>



Terry. George R. (1956). *Principles of Management*. Publish Richard D. Irwin from The University of California.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 TH 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan